

FORMASI DAN STRUKTUR GERAKAN SOSIAL PETANI

Studi Kasus Gerakan Reklaiming/Penjarahan Atas Tanah PTNP XII (Persero) Kalibakar Malang Selatan

Wahyudi

Abstract

This field research takes place in Ex-Dutch Plantation Kalibakar, South of Malang during 1999 – 2005. The objective of this research is to analyze the process of peasant movement in Kalibakar.

Based on this research, the peasant social movements are determined by 1) structural conduciveness, 2) structural strain, 3) the growth and spreading of common belief, 4) activating factors, 5) participant mobilization, 6) social control, 7) supports from movement network, 8) decision making arena, and 9) social structure differentiation.

PENDAHULUAN

Dimaksudkan dengan gerakan sosial petani Kalibakar dalam studi ini adalah gerakan yang dilakukan oleh para petani dari ‘enam desa’ (Simojayan, Tlogosari, Tirtoyudo, Kepatihan, Baturetno, dan Bumirejo) yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan status tanah eks HGU perkebunan Belanda (secara hukum HGU-nya baru akan berakhir Tahun 2013 nanti) melalui penerapan program *land reform*. Oleh karena setelah melalui perjuangan yang panjang, tidak juga membuahkan hasil, maka para petani itu memberikan ‘tekanan’ agar keinginan mereka dituruti melalui strategi reklaiming (istilah petani) atau penjarahan (istilah perkebunan). Gerakan petani tersebut sesungguhnya telah di mulai sejak jaman pasca pendudukan Jepang, kemudian berlanjut pada masa agresi Belanda ke-II, era pemerintahan Orde Lama (Orla), Orde Baru (Orba), Era Reformasi, dan bahkan hingga detik ini pun belum selesai secara tuntas.

Studi lapangan ini hanya memfokuskan gerakan petani yang terjadi sejak era Orde Baru. Oleh karena itu, penelitian ini merumuskan periode gerakan ke dalam empat era perjuangan. Pertama, Era Jaringan Terbatas yang terjadi pada tahun 1992-1993, dimana akibatnya adalah diambilnya kembali tanah di areal hutan ‘TT’ ($\pm 22,50$ ha) yang diyakini petani sebagai tanah khas Desa Simojayan. Kedua, Era Perluasan Jaringan yang terjadi pada tahun 1996-1997, dimana

mereka memperjuangkan untuk dikembalikannya kelebihan tanah di afdeling Petungombo serta sertifikasi atas tanah yang telah dijanjikan oleh pemerintah. Kegagalan perjuangan petani ini juga berujung pada dilakukannya tindakan reklamasi/ penjarahan terhadap areal afdeling Petungombo (\pm 240 ha).

Ketiga, Era Puncak Jaringan yang terjadi pada tahun 1998-2000, dimana para petani Kalibakar mendapat dukungan penuh dari semua pihak di era gerakan reformasi untuk mengambil kembali tanah yang dianggapnya sebagai tanah perjuangan nenek moyang mereka. Ketika itu sekitar 94% dari luas perkebunan Kalibakar (\pm 2.050,50 ha) diambil kembali oleh petani. Peristiwa pada era ini juga merupakan akumulasi kekecawaan perjuangan petani yang panjang, dimana mereka berkeinginan dijadikannya pedoman *land reform* sebagai strategi penyelesaian kasus status tanah dengan pihak perkebunan. Keempat, Era Deklinasi Gerakan yang terjadi pada tahun 2001-2005, dimana para petani yang masih memperjuangkan legalitas atas tanah yang sudah didapatkan ditinggalkan oleh elemen-elemen yang sebelumnya secara tegas dan formal mendukungnya.

Pada periode gerakan tahun 2001-2005 itu memberikan isyarat tentang terhentinya perjuangan petani di tengah jalan. Pada satu sisi dapat menduduki tanah perkebunan yang telah lama diperjuangkan, namun di sisi lain mereka gagal mendapatkan sertifikat hak milik atas tanah yang telah didistribusikan itu. Sementara secara hukum formal, seperti ditegaskan di alinea atas, bahwa HGU PTPN XII Kalibakar itu baru akan berakhir pada tahun 2013 nanti.

Sebagai sebuah fenomena gerakan sosial, gerakan reklamasi/penjarahan yang dilakukan oleh para petani Kalibakar tersebut menarik untuk dikaji secara ilmiah. Kasus Kalibakar tentu terjadi bukan hanya karena disebabkan oleh adanya kemauan petani, dan kondusifitas struktur sosial saja, tetapi juga oleh aspek-aspek penting lain. Misalnya, iklim politik dan dukungan *networking* yang ketika itu berada di pihak petani.

Ketika studi ini dilakukan, peneliti mengetahui ada dua penelitian yang dilakukan di Kalibakar. Pertama adalah yang dilakukan oleh Araf dan Puryadi (2002), yang mana menyimpulkan bahwa gerakan Kalibakar memiliki dampak positif bagi kehidupan petani. Kedua adalah studi yang dilakukan oleh Mustain (2005), yang mana lebih menekankan pada pengaruh aspek kesejarahan sosial. Mustain diantaranya menyimpulkan, bahwa akar permasalahan kasus Kalibakar adalah dimulai dari sejarah lahirnya hak *erfpacht* yang kemudian dikonversi menjadi HGU pada tanah perkebunan yang dalam prakteknya sering terjadi

penyimpangan peruntukan, penguasaan dan pengasingan terhadap penduduk sekitar atas peran koeksistensi sehingga memicu konflik.

Kedua hasil penelitian di atas memang setidaknya telah ikut andil untuk menjelaskan fenomena Kalibakar, namun belum menjawab pertanyaan bagaimana proses dari berbagai *determinants* yang ada turut memberikan kontribusi bagi terciptanya gerakan reklamasi/penjarahan dalam setiap periode gerakan sebagaimana disinggung di atas.

Peneliti melihat, kasus Kalibakar tidak hanya dipengaruhi oleh aspek sejarah sosial saja (janji utusan Belanda yang akan mengembalikan seluruh tanah kepada petani setelah masa *erfpacht* habis), tetapi juga kesalahan prosedur dalam penerbitan HGU (meski tidak semua salah); kemunculan tokoh reformis; pro dan kontra di kalangan masyarakat; dukungan partai politik; soliditas, solidaritas, dan militansi di kalangan petani gerakan; ketidak-berdayaan penegakkan keamanan; kondisi struktural Kalibakar; serta terciptanya peluang karena kondusifitas iklim politik.

Sejauh eksplorasi bahan kepustakaan yang dilakukan mengenai gerakan petani, ditemukan bahwa studi-studi terdahulu di Indonesia lebih menekankan pada persoalan akar masalah gerakan atau sumber penyebab gerakan petani. Dalam studi tersebut tidak dikaji bagaimana berbagai *the main* atau *the important determinants* dari tindakan kolektif itu saling berhubungan, saling mempengaruhi, serta saling melengkapi sehingga terjadi aksi atau perilaku kolektif yang berupa gerakan sosial petani.

Kemunculan, terbentuknya, beroperasinya, berubahnya, dan modifikasi struktur gerakan sosial petani merupakan sesuatu yang menarik. Peneliti telah mencoba meneliti lebih jauh tentang formasi dan struktur gerakan sosial petani Kalibakar yang terjadi pada rentang tahun 1992-1993 sampai dengan tahun 2005. Peneliti menemukan data, bahwa dalam setiap peristiwa gerakan reklamasi/penjarahan ternyata orientasi para aktornya adalah bukan hanya *norm-oriented* saja, tetapi diantara mereka ada juga yang berorientasi pada sumber-sumber (*resources-oriented*). Hal ini dapat ditemukan pada adanya *interest* para aktor terhadap tanah (*land property*) dan kekuasaan sosial-politik (*social and political power*). Proses tersebut menarik untuk dikaji lebih dalam, karena dalam gerakan sosial yang menghendaki penerapan norma, terdapat pula orientasi lain yang justru berperan 'positif' bagi terjadinya fenomena Kalibakar.

TINJAUAN PUSTAKA

Gerakan petani merupakan bagian dari gerakan sosial. Gerakan petani umumnya merupakan gerakan reformatif, karena mereka hanya menghendaki dilakukannya perubahan atas sebgai nilai atau norma yang ada (Aberle dalam Kamanto:2000; Kornlum:1988).

Gerakan petani dapat masuk dalam kategori lama maupun baru. Masuk dalam klasifikasi 'lama' karena gerakannya berorientasi pada persoalan-persoalan ekonomi, dan kebutuhan materi lain (Keun:2000; Gusfield:1994). Terkadang gerakan petani juga dapat disebut sebgai gerakan 'baru', yakni jika terkait dengan nilai-nilai dan isu-isu modern seperti: HAM, keadilan, persamaan hak, lingkungan hidup, perdamaian, dll (Jaeyol:2000; Tilly:1998).

Gerakan petani itu biasanya berakar pada persoalan produksi komoditi, dan konflik dengan negara (Lindberg dalam Omvedt:1994), memiliki relevansi dengan kondusifitas iklim politik (Martin dan Halpin:1998; Haber:1997; Tilly:1978), didukung oleh jaringan organisasi yang misinya serupa (Rosenthal, Fungruth, dkk.:1985), dengan tujuan meraih kepentingan bersama (Molyneux:1998). Gerakan petani sering terjadi akibat dari mobilisasi personal maupun kognitif (Koen:2000).

Dalam episode gerakan sosial sering muncul dramatisasi isu sosial. Gerakan ini juga menjadi pembuka pintu bagi peluang perubahan sosial dan ekspansi akses struktural bagi para partisipan dan anggota masyarakat lain (Harper:1989). Gerakan sosial dapat memiliki dampak positif, baik dalam level pribadi partisipan, organisasi gerakan, komunitas partisipan, dan struktur makro masyarakat (Cable dan Degutis:1997).

Bahwa gerakan petani itu bersumber dari atau sebagai akibat dari berbagai faktor, yakni: 1) komersialisasi lahan pertanian (Zagoria:1974; Siahaan:1999), 2) ketidak-adilan dan penindasan yang sudah tidak bisa ditolerir, serta lonjakan biaya hidup akibat krisis ekonomi (Ekstein:1989, Hafid:2001), 3) meluasnya peranan negara dalam proses transformasi pedesaan melalui revolusi hijau (Scott:1985), 4) kebijakan yang tidak adil, perubahan sosial yang sangat cepat, dan kemerosotan kewibawaan pemimpin tradisional (Sharaishi:1980), 5) ganti rugi tanah yang tidak memadai, dan munculnya isu demokrasi (Prasetyohadi, dkk.:1998), 6) pengingkaran terhadap hak tradisional petani (Sudrajat, dan Bukhari:2000), 7) sistem pengelolaan tanah yang hanya menguntungkan penguasa dan kroninya (Bachriadi dan Lucas:2001; Sudiby:1999), dan 8) model pengurusan yang tidak tepat (Majalah Dinamika Petani:1999).

Menurut Smelser (1962), manusia memasuki episode perilaku kolektif karena ada sesuatu yang salah dalam lingkungan sosialnya. Beberapa elemen dari lingkungan sosial itu disebutnya sebagai *the important determinants of collective behavior*, yakni: kondusifitas struktural, ketegangan struktural, pertumbuhan dan penyebaran 'kepercayaan umum', faktor-faktor pemercepat, mobilisasi partisipan, dan kontrol sosial. Smelser (1962) mengembangkan konsep yang disebutnya sebagai 'value added', untuk menerangkan bagaimana proses berbagai elemen tersebut saling memberikan kontribusinya sehingga tercipta perilaku kolektif.

Peneliti melihat bahwa meskipun teori Smelser (1962) ini merupakan teori lama dan sudah banyak mendapatkan kritik, namun masih tepat untuk menganalisa fenomena gerakan reklamasi/penjarahan di Kalibakar, khususnya yang terkait dengan fenomena dari para aktornya yang berorientasi pada norma.

Apabila teori Smelser (1962) dalam *norm-oriented movements* lebih menekankan peran pentingnya norma, di sisi lain Charles Tilly (1978) dalam membicarakan model mobilisasi tindakan kolektif, lebih menekankan pada aspek *interest*. Menurut Tilly (1978), analisis terhadap aksi kolektif memiliki lima komponen besar, yakni: kepentingan (*interest*), organisasi, mobilisasi, peluang (*opportunity*), dan tindakan kolektif itu sendiri.

Charles Tilly (1978) memaparkan, bahwa aspek kepentingan (*interest*) dimaksud berkaitan dengan persoalan ekonomi dan kehidupan politik. Aspek organisasi berkaitan dengan organisasi yang *well-defined groups*. Aspek mobilisasi berkaitan dengan faktor-faktor produksi seperti: tanah, pekerja, kapital, dan teknologi. Aspek *opportunity* berkaitan dengan peluang politik, peluang koalisi, tingkat represi atau ancaman, serta relasi antara pemerintah dengan *contender* yang berjuang untuk mendapatkan *power*. Sedangkan aspek tindakan kolektif adalah berkaitan dengan adanya konflik kepentingan.

Charles Tilly membedakan antara situasi revolusioner (*revolutionary situation*) dan hasil yang revolusioner (*revolutionary outcome*). Situasi disebut revolusioner ketika beberapa jenis tindakan kolektif yang melawan pusat kekuasaan adalah jelas. Jenis tindakan itu dapat berupa demonstrasi, kerusuhan, gerakan sosial, *revolt*, perang sipil, atau manifestasi antagonisme lain terhadap negara. Sementara *revolutionary outcome* akan terjadi jika ada perpindahan actual atas kekuasaan.

Situasi revolusioner akan muncul ketika para pembangkang berhasil melakukan mobilisasi sumber-sumber finansial, organisasional, dan *coercive resources*. Sedangkan *revolutionary outcome* akan terjadi jika mobilisasi itu lebih besar daripada

kemampuan negara dalam memanfaatkan kekuasaan, materiil, dan sumber-sumber alternatif untuk mencegah mobilisasi tersebut.

Peningkatan jumlah pembangkang (*contender*) menurut Tilly diantaranya dipengaruhi oleh: a) penolakan *contender* untuk membuat akses pada kekuasaan, b) kegagalan tanggung jawab negara terhadap penduduk, c) terjadinya krisis keuangan yang dialami oleh negara, dan d) ketidak-efektifan kekuasaan represif negara, karena militer atau anggotanya berkoalisi dengan pembangkang.

Model analisis mobilisasi Tilly (1978) di atas dapat saling melengkapi dengan model yang dibangun oleh Smelser (1962) tentang bagaimana proses tindakan atau perilaku kolektif itu terjadi dalam kasus Kalibakar. Alasan rasionalnya adalah Smelser (1962) tidak memberi tekanan pada *interest*, sedangkan Tilly (1978) tidak memberikan perhatian pada aspek *belief*. Padahal, kedua elemen tersebut sangat menentukan dalam peristiwa Kalibakar.

Gerakan petani sebagai salah satu jenis dari gerakan sosial, kemunculannya tidak dapat lepas dari adanya keterkaitan dengan jaringan sosial. Dari berbagai teori tentang jaringan sosial, pemikiran Sheller (2000) tentang sifat *fluidity* dari jaringan nampaknya cocok untuk melihat fenomena Kalibakar. Pendekatan "*fluid*" ini berasumsi bahwa ruang sosial itu berperilaku seperti cairan.

Rasionalitas yang diajukan oleh pendekatan "*fluid*" ini adalah: 1) kita tidak bisa mengabaikan bagaimana aktor sosial secara fisik bergerak melalui ruang, kapan, dan dimana mereka bertemu dengan orang lain, bagaimana mereka sampai di sana; 2) gerakan sosial secara intrinsik berhubungan dengan gerakan aktual manusia, informasi, dan jenis arus lain dalam wilayah geografi tertentu. Ia dipengaruhi oleh sesuatu yang di sekitarnya; 3) jika kita berbicara gerakan, maka juga harus mengkaitkannya dengan insentif, ideologi, emosi, peluang politik, dan aneka isu di sekitarnya.

Mengenai terbentuknya jaringan sosial, Roger Gould (2000) menyorotinya dari perspektif strukturalis dan rasionalis. Dalam perspektif strukturalis dikatakan bahwa jaringan sosial muncul karena dipengaruhi oleh konteks pola lokal atau struktur sosial. Aktor sosial terikat dalam peran khusus atau ia berada dalam kerangka kerja institusi tertentu. Bahwa perilaku sosial tidak hanya dipengaruhi oleh posisi ekonomi, sikap dan pertimbangan untung rugi saja, tetapi juga oleh "*strong social attachments*" terhadap orang lain. Sedangkan dalam perspektif rasionalis dikatakan bahwa formasi jaringan itu dipengaruhi oleh adanya *self-interest*.

Teori jaringan yang dipergunakan dalam studi ini adalah yang dapat menerangkan tentang bagaimana proses terciptanya struktur jaringan itu. Tepatnya tentang pertimbangan atau motif yang dipergunakan oleh aktor untuk masuk, berada, dan keluar dari jaringan gerakan. Beberapa pertimbangan atau motif yang sudah ditemukan dalam temuan terdahulu misalnya tentang: peran komitmen aktor (Cook's dan Kollock, serta Lawler dan Yoon dalam Turner:1998), kalkulasi rasional tentang *cost and benefit* dalam teori pertukaran (Turner:1991), pertimbangan *self interest* (Gould:2000), dan peran emosi sebagai perekat (Markovsky dan Lawlers dalam Ritzer:2000).

TEMUAN LAPANGAN DAN KAJIAN TEORITIK

Tradisi teoritik yang dipergunakan untuk membahas hasil penelitian ini adalah teori perilaku kolektif (*theory of collective behavior*) dari Neil J. Smelser (1962) dan model mobilisasi tindakan kolektif dari Charles Tilly (1978). Kedua kerangka teoritik ini akan dikombinasikan untuk melihat kasus Kalibakar, karena menurut temuan lapangan diketahui bahwa para aktornya ada yang berorientasi pada norma, yaitu *land reform* (untuk kepentingan bersama petani) dan ada pula yang berkepentingan untuk mengejar *self interest* yang berupa kekuasaan sosial dan politik (*social and political power*).

Paparan kajian teori tersebut akan disampaikan mulai dari Smelser (1962) baru kemudian diikuti oleh Tilly (1978). Namun demikian sebelum semua itu dijelaskan, terlebih dahulu akan diangkat hal-hal yang bersifat umum tentang temuan lapangan dalam kasus Kalibakar. Paparan temuan lapangan dalam ringkasan hasil penelitian ini tidak disajikan seperti dalam sistematika laporan penelitian, yakni Era Jaringan Terbatas (1992 – 1993), Era Perluasan Jaringan (1996 – 1997), Era Puncak Jaringan (1998 – 2000), dan Era Deklinasi Gerakan (2001 – 2005). Kerangka ringkasan ini mengikuti sistematika kerangka analisis penelitian yang dikembangkan dari Smelser dan Tilly sebagaimana dimaksud tadi.

Kondusifitas Struktural

Menurut Smelser (1962), proses terjadinya perilaku kolektif itu dimulai dari adanya persoalan dalam struktur sosial. Kondusifitas struktural ini merupakan embrio yang membuka peluang bagi terjadinya perilaku kolektif. Menurut temuan lapangan diketahui, bahwa ada serangkaian kondisi struktural Kalibakar yang memang dapat menjadi dasar terjadinya perilaku kolektif.

Secara umum kondisi struktural itu berkaitan dengan: 1) meningkatnya kontak dan komunikasi petani dengan orang-orang di luar petani yang memiliki strata yang berbeda, 2) sistem kekerabatan yang patrilineal, 3) sistem sosial yang paternalistik, 4) struktur mata pencaharian yang mayoritas petani dan buruh tani, 5) struktur pendidikan yang mayoritas tamat SD/ sederajat dan SLTP/ sederajat, 6) struktur politik yang berpusat pada pemerintah desa, 7) tidak adanya model penataan perkebunan dan lokasi hunian penduduk yang baik, serta 8) model kehidupan masyarakat yang lebih berorientasi pada 'sosialisme', sehingga bertentangan dengan model pengelolaan perkebunan yang *profit* atau *bussines oriented*.

Selain kondisi struktur umum tersebut, terdapat pula kondisi-kondisi khusus yang melekat pada masing-masing periode gerakan. Pada era jaringan terbatas (1992-1993) kondisi itu misalnya: kristalisasi ide Program Pertanian Rakyat Bersama (P2RB) yang didukung oleh pemerintahan desa dan adanya dukungan dari organisasi masyarakat (ormas) yang berafiliasi ke partai politik besar ketika itu. Pada era perluasan jaringan (1996-1997) kondisi itu berupa: meluasnya dukungan kepada petani dari para eks-pelaku sejarah perjuangan di Kalibakar, dan gagalnya proses sertifikasi.

Sedangkan pada era puncak jaringan (1998-2000) kondisi khusus itu berupa: bergulirnya era reformasi yang menciptakan euforia politik dan adanya *vacuum of power*, sehingga penegakkan hukum dan keamanan kurang efektif. Sementara itu pada era deklinasi gerakan (2001-2005), para petani Kalibakar tidak lagi mendapatkan dukungan yang penuh.

Ketegangan Struktural

Penentu bagi terjadinya perilaku kolektif yang kedua menurut Smelser (1962) adalah terciptanya ketegangan struktural. Menurut temuan lapangan diketahui bahwa secara umum ketegangan itu dipengaruhi oleh tidak pernah selesainya persoalan *land dispute* antara petani dengan pihak perkebunan. Padahal perjuangan penyelesaian itu sudah dilakukan berpuluh-puluh tahun lamanya. Sementara itu ketegangan yang terjadi di era jaringan terbatas adalah berupa: terciptanya deprivasi ekonomi relatif di kalangan petani, adanya ketidak-senangan petani terhadap pihak perkebunan, serta fenomena klaim versus reklam antara petani dan perkebunan atas areal hutan 'TT'.

Elemen ketegangan yang terjadi pada era perluasan jaringan (1996-1997) adalah berupa emosi petani yang tidak terkendali atas kegagalan proses sertifikasi.

Sedangkan ketegangan yang terjadi pada era puncak jaringan (1998-2000) adalah berupa proses penularan dari peristiwa Simojayan terhadap seluruh petani di Kalibakar. *Contagion process* ini diperkuat dengan bergulirnya gerakan reformasi. Sementara itu, ketegangan pada era deklinasi gerakan (2001-2005) adalah mulai hilangnya dukungan terhadap perjuangan petani Kalibakar.

Tumbuh dan Menyebarnya Kepercayaan Umum

Aspek ketiga dalam proses terjadinya perilaku kolektif menurut Smelser (1962) adalah tumbuh dan menyebarnya kepercayaan umum yang terkait dengan persoalan yang sedang berkembang. Secara umum, *belief* yang tumbuh dan berkembang di kalangan petani Kalibakar adalah bahwa tanah eks HGU perkebunan Belanda itu adalah hak sah petani atas jasa perjuangan nenek moyang mereka.

Sementara itu, *belief* yang berkembang di era jaringan terbatas (1992-1993) adalah berupa: 1) keyakinan petani bahwa areal hutan 'TT' merupakan tanah khas desa sehingga mereka memiliki hak untuk membuat keputusan penggunaan tanah tersebut, 2) keyakinan bahwa reklamasi/ penjarahan merupakan strategi terbaik yang dapat dilakukan. Pilihan ini merupakan pilihan terakhir karena cara-cara prosedural yang sudah ditempuh tidak membuahkan hasil.

Kepercayaan umum yang ada pada era perluasan jaringan (1996-1997) adalah berupa: 1) keyakinan bahwa petani memiliki kelebihan tanah sekitar 160 ha di afdeling Petungombo, karena itu mereka berhak atas tanah tersebut, 2) keyakinan bahwa reklamasi/ penjarahan adalah cara terakhir yang terbaik untuk menyelesaikan konflik dengan perkebunan. Kepercayaan umum yang ada pada era puncak jaringan (1998-2000) adalah berupa: 1) keyakinan bahwa era reformasi merupakan saat yang paling tepat untuk mengambil kembali seluruh tanah yang pernah diambil oleh perkebunan, dan 2) keyakinan bahwa hanya melalui reklamasi/penjarahan saja petani dapat mencapai tujuan itu.

Sedangkan kepercayaan umum yang ada pada era deklinasi gerakan (2001-2005) adalah berupa: 1) keyakinan bahwa mereka berhak mendapatkan sertifikat hak milik atas tanah yang sudah diduduki, 2) keyakinan bahwa pemerintah tidak akan mengambil kembali tanah yang sudah mereka pergunakan untuk kepentingan pertanian itu.

Faktor Pemercepat

Penentu penting ke-empat dari perilaku kolektif menurut Smelser (1962) adalah faktor pemercepat. Pada era jaringan terbatas (1992-1993) faktor pemercepat itu berupa: 1) disetujuinya ide P2RB oleh pemerintah desa, 2) adanya dukungan ormas, dan 3) terjadinya pencurian pohon-pohon lindung di hutan 'TT' oleh orang-orang di luar petani. Faktor pemercepat pada era perluasan jaringan (1996-1997) adalah berupa kegagalan proses sertifikasi tanah, sementara itu petani sudah berkorban uang untuk kegiatan tersebut.

Sedangkan faktor pemercepat pada era puncak jaringan (1998-2000) berupa bergulirnya era reformasi, sehingga diantara dampaknya adalah terciptanya euforia politik di kalangan petani. Dalam era deklinasi tentu saja tidak ada faktor pemercepat gerakan. Justru yang terjadi adalah penghambat upaya petani untuk diterapkannya program *land reform* secara resmi oleh pemerintah. Dampak dari kondisi ini adalah ketidak-jelasan program sertifikasi atas tanah yang sudah diduduki oleh petani.

Jika kemudian dihubungkan dengan konsep Tilly (1978), maka dapat dikatakan bahwa faktor pemercepat tersebut ikut serta menciptakan peluang bagi terjadinya tindakan kolektif. Melalui penjelasan di atas, diketahui bahwa peluang yang ada adalah berupa: koalisi dengan ormas, koalisi dengan kekuasaan, relasi antara pemimpin petani dengan pejabat tertentu di institusi kekuasaan, dan terciptanya kondusifitas iklim politik.

Mobilisasi Partisipan

Aspek kelima yang turut menentukan perilaku kolektif menurut Smelser (1962) adalah mobilisasi partisipan. Aspek mobilisasi sebagai penentu penting dalam tindakan kolektif ini juga merupakan bagian dari pemikiran Tilly (1978). Dalam hal ini Tilly (1978) enar, bahwa mobilisasi itu dapat terkait dengan aspek produksi yang berupa tanah. Pada era jaringan terbatas (1992-1993) strategi mobilisasi yang ditempuh berupa: 1) meyakinkan kepada petani bahwa areal hutan 'TT' itu tanah khas desa, 2) mengajak petani mengoptimalkan tanah tersebut untuk kepentingan bersama petani, bukan untuk kepentingan individual, 3) meyakinkan petani bahwa mereka punya hak atas tanah tersebut, dan dapat diambil dengan cara reklaiming, 4) memperkuat basis dukungan yang sudah didapat dari ormas, dan 5) mengajak petani dengan seluruh keluarganya untuk ikut melakukan reklaiming.

Strategi mobilisasi para era perluasan jaringan (1996-1997) berupa: 1) meyakinkan petani bahwa mereka berhak mendapatkan sertifikat hak milik atas kelebihan tanah yang ada di afdeling Petungombo, 2) mengumpulkan uang secara sukarela untuk mendukung program sertifikasi, 3) memperkuat dan memperluas jaringan dukungan, baik ke pemerintah lokal maupun ke pusat, dan 4) mengajak petani berikut keluarganya melakukan reklamasi terhadap areal afdeling Petungombo.

Strategi mobilisasi pada era puncak jaringan (1998-2000) adalah berupa: a) mengajak petani untuk memanfaatkan situasi gerakan reformasi, 2) menerima pihak manapun sebagai anggota jaringan gerakan untuk mendukung perjuangan petani, dan 3) mengajak petani berikut keluarganya untuk melakukan reklamasi terhadap seluruh areal perkebunan Kalibakar. Sementara itu pada era deklinasi gerakan (2001-2005), strategi mobilisasi yang dilakukan berupa: 1) memantapkan sikap petani atas tanah yang sudah didudukinya, dan 2) melakukan lobi dan tekanan kepada pemerintah agar mengeluarkan sertifikat hak milik atas tanah yang sudah didayagunakan secara efektif oleh petani.

Kontrol Sosial

Penentu penting dalam perilaku kolektif yang keenam adalah berupa pelaksanaan kontrol sosial. Aspek ini oleh Tilly (1978) disebut dengan istilah represi atau fasilitasi. Menurut Smelser (1962), kontrol sosial ini bisa dilakukan pada saat akan terjadi perilaku kolektif maupun pada saat peristiwa itu sedang terjadi. Berdasarkan hasil penelitian diketahui, bahwa kontrol sosial terhadap tindakan reklamasi/ penjarahan di Kalibakar dalam seluruh periode tidak berlangsung secara efektif. Ketidakefektifan kontrol sosial ini pula yang membuka peluang bagi terjadinya tindakan kolektif tersebut. Dalam kasus Kalibakar, analisa Tilly (1978) juga tepat ketika ia melihat bahwa ketidakefektifan represi, koalisi antara *contender* dengan kekuasaan, dan situasi krisis yang dialami negara akan turut memperlebar peluang bagi terjadinya tindakan kolektif. Kondisi ini dapat terjadi karena kekuasaan akan berada dalam posisi yang lemah.

Dukungan Jaringan Gerakan

Selanjutnya, studi Kalibakar ini juga menemukan elemen penentu lain yang tidak disinggung baik oleh Smelser (1962) maupun oleh Tilly (1978), yakni dukungan jaringan dalam proses terjadinya perilaku kolektif. Peneliti melihat, justru unsur ini sangat menentukan berlangsung tidaknya perilaku kolektif di

Kalibakar. Salah satu buktinya adalah apa yang terjadi di era deklinasi gerakan (2001-2005), yakni ketika petani kehilangan dukungan jaringan maka ketika itu pula perjuangan mereka tidak berjalan.

Pada era jaringan terbatas (1992-1993) dukungan jaringan petani berasal dari salah satu ormas yang berafiliasi ke partai politik besar ketika itu. Pada era perluasan jaringan (1996-1997) dukungan jaringan berasal dari jaringan tahun 1992-1993 ditambah dengan orang-orang pelaku sejarah redistribusi tanah di jaman agresi Belanda ke-II. Bersama orang-orang eks pelaku sejarah itulah petani dapat menggandeng jaringan ke institusi kekuasaan, baik lokal maupun nasional.

Pada era puncak jaringan (1998-2000) dukungan jaringan berasal dari seluruh organisasi politik maupun non politik yang berada di Malang, serta para aktivis gerakan yang memiliki visi yang sama dengan perjuangan petani. Sedangkan pada era deklinasi gerakan (2001-2005), dukungan jaringan petani mulai melemah, bahkan boleh dikatakan menghilang. Perjuangan mereka hanya mengandalkan organisasi petani yang dibuat oleh mereka saja. Mundurnya dukungan jaringan ini lebih dikarenakan oleh tidak adanya dukungan iklim politik sebagaimana pernah terjadi di era sebelumnya.

Meminjam pemikiran Tilly (1978), maka di dalam jaringan tersebut dapat berupa organisasi, baik organisasi internal petani, maupun organisasi eksternal petani, serta para aktivis atau pun *free-riders*. Pada era jaringan terbatas (1992-1993) maupun pada era perluasan jaringan (1996-1997), organisasi yang menggerakkan petani bukanlah *well defined groups* sebagaimana dipikirkan Tilly (1978), namun diwakili oleh organisasi pemerintahan desa yang sepenuhnya simpatik pada perjuangan petani. Organisasi petani dalam makna yang sudah *well defined* baru ada sejak tahun 1998.

Arena Pengambilan Kesempatan

Aspek lain yang menurut terpenting menurut Tilly (1978) adalah *interest*. Penelitian ini melihat, bahwa ternyata tidak semua orang yang terlibat dalam gerakan sosial petani itu semuanya berorientasi pada upaya diterapkannya norma *land reform*. Rupanya, upaya *norm-oriented* tersebut lebih dimiliki oleh para pemimpin gerakan petani, kalangan LSM, dan aktivis mahasiswa. Mereka itulah yang dapat disebut sebagai aktor yang idealis. Sedangkan para petani biasa, yang berstatus sebagai pengikut gerakan, orientasinya lebih pada *land property* saja. Mereka ini dapat disebut sebagai aktor yang bertipe materialis atau pragmatis.

Tipe aktor lain yang ditemukan adalah aktor yang *opportunist*, yakni orang-orang yang pandai memanfaatkan kepentingan untuk dirinya sendiri sambil menolong orang lain. Peneliti menyebutnya sebagai fenomena *lord bountiful oriented*, yaitu para tuan, atau pejabat, atau penguasa yang bermaksud menjadi 'dermawan' atau orang yang berjasa secara politik dalam kasus Kalibakar. Dengan demikian gerakan sosial petani dapat dipahami sebagai arena pengambilan kesempatan (*taking chance or seeking opportunity*) bagi masing-masing aktor atas dasar interesnya masing-masing.

Penelitian Kalibakar ini menemukan data, bahwa pertimbangan atau keputusan aktor untuk masuk ke dalam jaringan itu dipengaruhi oleh tiga faktor. Pertama, adalah faktor kondusifitas sistem sosial politik. Kedua, faktor subyektifitas aktor, yang dapat berupa nilai tentang ideologi tertentu, dan penilaian terhadap peristiwa sosial tertentu. Ketiga, faktor kemampuan dari kedua belah pihak, khususnya pihak yang memerlukan dukungan jaringan dalam mengembangkan hubungan komunikasi yang efektif.

Diferensiasi Struktur Sosial

Gerakan reklamings/penjarahan yang terjadi di Kalibakar, jika dilihat dari perspektif teori modernisasi adalah merupakan konsekuensi dari dinamika perubahan sosial yang secara evolutif dan bertahap senantiasa bergerak untuk membawa kondisi masyarakat pada tingkat kehidupan yang lebih baik/modern. Meminjam kerangka pemikiran Neil J. Smelser, maka kasus Kalibakar dapat dikatakan sebagai bagian dari proses diferensiasi struktur masyarakat. Sebagai masyarakat yang terus berkembang, struktur makro Kalibakar tidak dapat menjalankan seluruh tugas fungsional yang dibebankan pada sistemnya, sehingga diperlukan diferensiasi struktur baru untuk menjawab kebutuhan perubahan menjadi bagian dari sistem masyarakat modern itu.

Struktur gerakan reklamings/penjarahan, atau tepatnya organisasi yang sengaja dibentuk untuk meraih tujuan gerakan adalah merupakan sub-struktur dari struktur Kalibakar itu sendiri. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa organisasi gerakan petani itu sesungguhnya telah mengambil alih fungsi yang sebelumnya seharusnya merupakan fungsi dari sistem makro masyarakat Kalibakar. Namun karena masyarakat terus berubah dari tradisional menuju modern, maka membawa konsekuensi terjadinya diferensiasi struktur tersebut.

Selanjutnya, bagaimana hubungan antara para aktor dengan struktur gerakan petani ketika itu. Untuk menjelaskan hubungan ini, peneliti meminjam strategi Smelser ketika ia memaparkan analisa tentang *individual attitudes toward the*

components of social action. Melalui pendekatan ini dapat diketahui, bahwa tindakan sosial aktor itu terkait dengan empat komponen dasar tindakan, yakni: nilai-nilai, norma-norma, mobilisasi energi aktor, dan ketersediaan fasilitas situasional.

Smelser tidak memfokuskan pada motif individu, tetapi lebih pada peran individu di dalam struktur tindakan. Peran tersebut diaktualisasikan dalam proses relasi sosial yang diatur oleh struktur yang ada. Pertanyaannya kemudian adalah proses apa yang dialami oleh individu itu sehingga mereka mempercayai dan menyepakati nilai dan norma yang ada dalam sistem tindakan itu.

Penelitian ini melihat, sebagaimana ditegaskan oleh Parsons — pikiran ini juga dikembangkan oleh Smelser —, bahwa di dalam struktur tindakan akan ada proses internalisasi dan sosialisasi yang bertujuan untuk memelihara integrasi dari pola nilai yang ada. Bahwa internalisasi nilai itu merupakan akibat dari proses sosialisasi sampai akhirnya nilai dan norma itu menjadi bagian dari ‘kesadaran’ individu atau aktor itu sendiri. Akibatnya, dalam mengejar kepentingan mereka sendiri itu, para aktor sebenarnya juga sudah mengabdikan kepada kepentingan sistem sebagai satu kesatuan.

TEMUAN TEORITIK

Berdasarkan temuan lapangan dan kajian teoritik sebagaimana dipaparkan di atas, dapat diketahui bahwa penelitian ini membawa peneliti berada pada posisi sebagai Smelselian sekaligus juga Tillyian. Artinya secara umum, hasil studi ini sejalan dan mendukung pemikiran kedua teoritis tersebut. Namun secara khusus riset ini juga menemukan konsep-konsep pokok yang berbeda, dan barangkali temuan inilah yang menjadi kekhasan sosiologi gerakan sosial petani Indonesia.

Pada bagian bawah ini akan lebih ditekankan untuk mengulas temuan teoritik Smelselian-Tillyian yang tidak sejalan dengan pemikiran Smelser dan Tilly. Adapun temuan yang dimaksud meliputi: 1) adanya hukum aktivasi dan kontrol sosial dalam setiap fase perkembangan perilaku kolektif, 2) pentingnya menempatkan *networking* ke dalam bagian dari *the main* atau *the important determinants* tindakan atau perilaku kolektif, dan 3) model gerakan sosial yang merupakan hasil konvergensi dari teori Smelser (1962) dan Tilly (1978). Berikut ini temuan itu akan diulas secara singkat.

Hukum Aktivasi

Aktivasi adalah proses mengaktifkan *the important determinants of collective behavior*, baik yang berada di dalam sistem nilai atau pengetahuan manusia, maupun

yang berada di dalam sistem kemasyarakatan, sehingga *determinants* tersebut memiliki makna (*meaning*) yang mendukung bagi terjadinya perilaku kolektif. Aktivasi tersebut dapat dilakukan secara alamiah, yakni melalui proses pergaulan keseharian, atau melalui upaya yang terorganisir. Jaringan pendukung gerakan sosial memiliki peran yang sangat penting dalam membantu proses aktivasi.

Pengertian aktivasi di sini berbeda dengan batasan tentang mobilisasi partisipan sebagaimana dikemukakan oleh Smelser maupun oleh Tilly. Peneliti melihat, bahwa tanpa aktivasi maka keberadaan dari *the important determinants of collective behavior* itu akan tidak memiliki arti atau makna. Artinya, tanpa adanya aktivasi maka eksistensi dari sesuatu substansi itu tidak akan memiliki fungsi atas keberadaannya. Dengan aktivasi, akhirnya keberadaan sesuatu *determinants* akan memiliki fungsi untuk memberikan nilai tambahnya bagi sesuatu *determinants* yang lain.

Smelser maupun Tilly tidak menyinggung konsep aktivasi ini. Padahal menurut peneliti konsep ini sudah ada sejak dalam tahap awal proses yang akan menuju ke terjadinya perilaku kolektif. Dalam kaitan ini, Smelser memang berbicara tentang fungsi komunikasi dalam proses perilaku kolektif. Tetapi menurut peneliti fungsi komunikasi yang dimaksud adalah berbeda dengan konsep aktivasi yang ditemukan dalam studi ini. Jika kedua konsep ini harus diposisikan, maka menurut peneliti, bahwa aktivasi itu merupakan proses pengaktifan *determinants* sehingga memiliki makna atau arti mendalam sehingga bisa mendorong terjadinya perilaku kolektif. Sedangkan komunikasi adalah merupakan alat yang dapat dipakai di dalam aktivasi itu.

Hukum Kontrol Sosial

Selanjutnya tentang kontrol sosial. Smelser menyebutkan bahwa kontrol sosial itu bisa dilakukan untuk meminimalisir kondusifitas dan ketegangan, serta untuk mengontrol perilaku kolektif yang sedang berlangsung. Peran kontrol sosial dapat dilakukan, baik oleh lembaga agensi kontrol sosial pemerintah maupun oleh masyarakat yang tidak menyetujui bagi terjadinya suatu perilaku kolektif. Dalam konsep Tilly (1978), kontrol sosial itu disebut dengan represi.

Menurut peneliti, teori Smelser maupun Tilly tersebut kurang lengkap. Karena berdasar studi lapangan ini diketahui, bahwa kontrol sosial itu selalu ada menyertai keberadaan aktivasi. Setiap ada aktivasi, maka akan ada kontrol sosial, tidak peduli perilaku kolektif itu sedang berada pada tahap yang mana. Keberadaan aktivasi dan kontrol sosial itu mirip dengan keberadaan *push and pull factors* dalam hukum migrasi. Hukum aktivasi dan kontrol sosial itu juga

dapat diumpamakan dalam hukum mekanika, dimana setiap ada daya dorong pasti diikuti oleh adanya daya tolak (misal daya gesek). Rasionalitas dari hasil studi ini adalah bahwa setiap ada gangguan terhadap stabilitas atau keamanan sistem, maka pasti akan ada reaksi yang dilakukan untuk menciptakan kembali *social order*.

Dukungan Jaringan Gerakan

Smelser (1962) maupun Tilly (1978) tidak menyinggung sama sekali tentang posisi dukungan jaringan dalam *the important determinants of collective behavior*. Sementara itu, menurut peneliti, dukungan jaringan adalah merupakan salah satu *determinants* yang sama pentingnya dengan elemen-elemen yang telah disebutkan oleh Smelser. Tanpa dukungan jaringan, peneliti melihat bahwa perilaku kolektif yang berorientasi pada norma tidak akan dapat berlangsung.

Kenapa tanpa dukungan jaringan gerakan orientasi norma tidak dapat berjalan?. Hal ini disebabkan, bahwa setiap gerakan sosial pasti akan menghadapi tantangan atau hambatan dari pihak-pihak yang tidak setuju pada gerakan sosial itu. Semakin norma yang ingin dirubah atau diterapkan itu berada dalam posisi yang bertentangan dengan norma lama atau norma yang sedang berlaku, maka semakin besar kebutuhannya untuk mendapatkan dukungan jaringan. Berdasarkan hal tersebut, maka kehadiran dukungan jaringan itu ikut memberikan nilai tambah bagi proses perilaku kolektif.

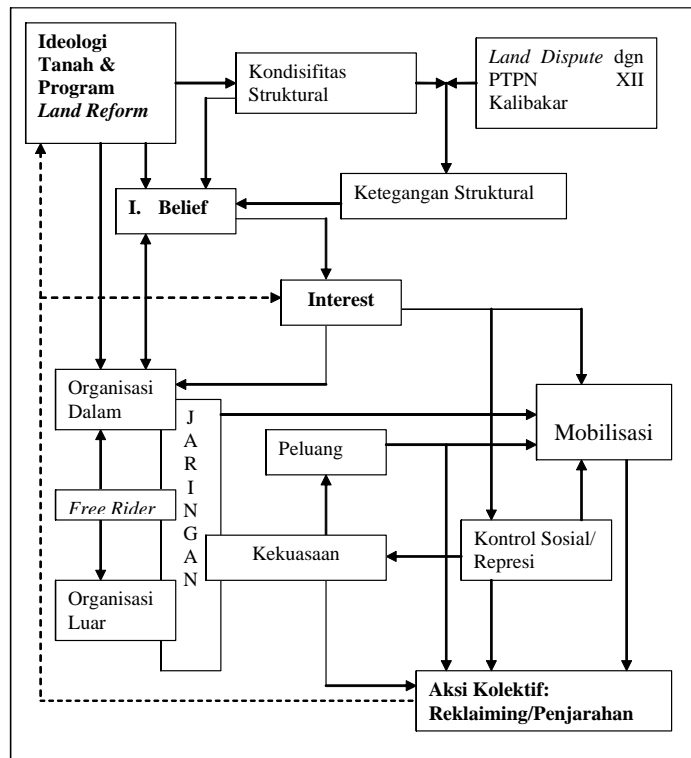
Serangkaian temuan teoritik di atas, mengisyaratkan dapat dilakukannya konvergensi teori Smelser (1962) dengan teori Tilly (1978) dalam memahami penentu-penentu penting dalam terjadinya tindakan perilaku kolektif. Hasil konvergensi tersebut dapat dilihat di bagian akhir ringkasan ini. Skema tersebut diantaranya menjelaskan, bahwa dalam suatu tindakan perilaku kolektif sangat mungkin para aktornya memiliki kepentingan yang berbeda. Hal ini bisa dikatakan, bahwa para aktor itu sama-sama memiliki kepentingan, tetapi tidak selalu memiliki kepentingan yang sama. Oleh sebab itu, prinsip yang menyebutkan bahwa gerakan sosial itu terjadi karena para aktornya ingin mengejar kepentingan bersama perlu ditinjau ulang. Barangkali yang benar adalah bersama-sama mengejar kepentingan, dan bukan mengejar kepentingan bersama.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan kerangka teori yang ada, diketahui bahwa formasi dan struktur gerakan sosial petani Kalibakar ditentukan oleh aspek-aspek: 1) kondusifitas

struktural, 2) ketegangan struktural, 3) tumbuh dan berkembangnya kepercayaan umum (*generalized belief*), 5) aktivasi dan mobilisasi partisipasi, 6) kontrol sosial, 7) dukungan jaringan dukungan (organisasi dalam, *free rider*, dan organisasi luar), 8) arena pengambilan kesempatan untuk merealisasi interes aktor, dan 9) diferensiasi struktur sosial. Teori yang ditemukan dalam penelitian ini merupakan bagian dari teori sosiologi makro yang menaruh perhatian pada aksi atau perilaku kolektif dari suatu gerakan sosial petani.

Model Gerakan Sosial Petani Kalibakar



Keterangan: Dikembangkan atas dasar hasil konvergensi antara Teori Smelser (1962) dan Tilly (1978) dalam kasus Kalibakar.

Berdasarkan temuan lapangan maupun teoritik di atas, peneliti diantaranya memberikan rekomendasi sebagai berikut: 1) studi terhadap gerakan sosial atau pun petani sebaiknya tidak terbatas pada kajian literatur, namun sebaiknya langsung di lapangan. Hal ini akan membuka peluang untuk diketahuinya segenap sistem

nilai dan norma yang laten, serta untuk mengukur aktualitas teori yang selama ini dijadikan pedoman, 2) agar setiap ada penyalahgunaan tanah negara, segera dilakukan penertiban. Jika tidak maka permasalahannya akan semakin akut dan sulit diselesaikan secara baik-baik, 3) agar setiap penyelesaian permasalahan antara petani dengan perkebunan selalu memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum formal, kesejarahan sosial, dan tingkat kedalaman konflik yang tengah berlangsung. Pemerintah, perkebunan, dan petani harus kembali pada posisinya masing-masing, sehingga menjadi jelas hak dan kewajiban mereka dalam proses penyelesaian masalah itu.

DAFTAR PUSTAKA

- Araf dan Puryadi (2002). *Perebutan Kuasa Tanah*. Yogyakarta: LAPPERA Pustaka Utama.
- Eckstein, Susan (1989). *Power and Populer Protest, Latin America Social Movements*. Berkeley: University of California Press.
- Hafid (2001). *Perlawanan Petani, Kasus Tanah Jenggawah*. Jakarta: LSPP Latin.
- Ritzer, George dan Goodman, Douglas J. (2003). *Teori Sosiologi Modern (Terjemahan dari A limandan)*. Jakarta: Prenada Media.
- Smelser, Neil J. (1962). *Theory of Collective Behavior*. New York: The Free Press.
- Smelser, Neil, J. (1981). *Sociology*. Englewood Cliffs, New Best : Prentice-Hall Inc.
- Steven dan Kliner, Douglas (1991) *Postmodern Theory: Critical Interrogations*. New York: The Guilford Press.
- Tilly, Charles (1978). *From Mobilization to Revolution*. Amerika Serikat: Addison-Wesley Publishing Company.
- Turner, Jonathan Ralph H (1991). *The Structure of Sociological Theory*: First Edition. Wadsworth Publishing Company.
- Turner, Jonathan Ralph H (1998). *The Structure of Sociological Theory*: Sixth Edition. Wadsworth Publishing Company.

This document was created with Win2PDF available at <http://www.daneprairie.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.